

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kemunculan istilah-istilah lain selain internasional saat ini, seperti ‘transnasional’ dan ‘global’ mencerminkan semakin berkembangnya bentuk-bentuk interaksi antar negara yang turut melibatkan aktor-aktor baru non-negara, serta semakin meluasnya cakupan tema dan isu dalam studi hubungan internasional hingga ke ranah ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut turut didukung dan dipercepat oleh globalisasi yang kemudian menciptakan *interconnectedness* dan *interdependence* diantara negara-negara di dunia (Elias dan Sutch, 2007: 16). Ekonomi dan pembangunan bukan lagi merupakan isu yang harus dihadapi sendirian oleh sebuah negara, melainkan dapat diwujudkan sebagai komitmen bersama diantara negara-negara di dunia untuk mencapainya.

Salah satu permasalahan utama dalam studi pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini ialah pendidikan. Pendidikan merupakan jaminan paling dasar dan utama dalam melawan kemiskinan serta menjadi suatu representasi peluang untuk memberdayakan manusia dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah kehidupan dan masa depannya menjadi lebih baik (UNESCO, 2011: 40).

Dalam laporan UNESCO *Education for All Global Monitoring yang berjudul Education Counts: Towards the Millenium Development Goals*, satu tahun waktu tambahan yang ditempuh untuk bersekolah dapat meningkatkan pendapatan seseorang hingga 10%. Selain itu, 171 juta orang bisa terbebas dari kemiskinan jika semua siswa di negara-negara berpenghasilan rendah dapat bersekolah dan lulus minimal dengan keterampilan dasar membaca (2011: 7-8).

Menurut UNESCO (2016), terdapat hubungan yang jelas antara pendidikan, pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan. Masyarakat miskin dan terpinggirkan lebih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi yang buruk. Oleh karenanya, dengan akses pendidikan yang baik, masyarakat dapat berkontribusi untuk pengelolaan berkelanjutan dalam meningkatkan mata pencaharian, meningkatkan kesempatan dalam mengamankan pendapatan ekonomi di suatu negara, dan jika dilakukan secara kolektif dapat berkontribusi bagi pembangunan secara global.

Artikel 26 ayat (1) dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak atas pendidikan.” Hal tersebut sejalan dengan *the Convention on the Rights of the Child* pada tahun 1989 serta *the World Declaration on Education for All* (EFA) tahun 1990 yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus didukung oleh kerjasama internasional. Namun, menurut laporan UNESCO dalam *EFA Challenges and Achievement 2000-2015* (2015: 1), progres yang ditunjukkan dunia pada tahun 1990-an dalam bidang pendidikan dasar tidaklah cukup signifikan.

Dalam *EFA Challenges and Achievement 2000-2015* dilaporkan bahwa sekitar 204 juta anak-anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) berhenti sekolah pada tahun 1999. Di sisi lain, satu dari enam anak atau sekitar 100 juta anak yang tinggal di negara dengan pendapatan rendah dan menengah bahkan tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka.

Untuk menjawab kondisi permasalahan tersebut, dibentuklah *World Education Forum* di Dakar, Sinegal oleh UNESCO pada April tahun 2000 yang menghasilkan “*The Dakar Framework on Action*” dengan enam tujuan dalam bidang pendidikan untuk dapat dicapai pada tahun 2015.

World Education Forum bukanlah forum pertama yang membahas mengenai EFA dan permasalahan pendidikan di tingkat internasional. Sebelumnya telah dibentuk *World Conference on EFA* pada tahun 1990 di Jomtien, yang dilatarbelakangi oleh stagnansi angka partisipasi sekolah di berbagai wilayah dunia serta *Mid-Decade Meeting* di Amman pada tahun 1996 (UNESCO, 2015: 44). Diselenggarakannya *World*

Education Forum di Dakar merupakan upaya untuk mengembalikan optimisme agenda EFA di tahun 1990.

Tidak lama setelah diadopsinya *the Dakar Framework* dalam *World Education Forum*, tepatnya pada bulan September tahun 2000, PBB meresmikan kerangka komitmen tujuan pembangunan global yang disebut Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Dua dari target EFA kemudian diadopsi oleh Tujuan Pembangunan Milenium sebagai bentuk upaya PBB di tingkat global untuk menjawab permasalahan dalam pendidikan dasar tersebut. Adapun salah satu dari dua target EFA yang diadopsi PBB yakni ialah target 3 dalam Tujuan 2: Pendidikan Dasar untuk Semua atau Pendidikan Dasar Universal.

Dalam target 3 Tujuan Pembangunan Milenium digunakan tiga indikator kesuksesan pencapaian target yang dirumuskan oleh UNESCO (www.unmillenniumproject.org, 2006), yaitu: (1) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (7-12 tahun); (2) Proporsi murid mencapai kelas 5 dan (3) Angka Melek Huruf (AMH) usia 15-24 tahun. Indikator-indikator tersebut ditargetkan untuk dapat mencapai angka 100% pada tahun 2015.

Sebagai salah satu negara anggota UNESCO dan PBB, Indonesia turut mengadopsi agenda EFA serta agenda Tujuan Pembangunan Milenium dengan menyesuaikan kebijakan nasionalnya berdasarkan agenda-agenda tersebut. Diantara kebijakan-kebijakan nasional yang dibentuk berdasarkan agenda pendidikan EFA dan Tujuan Pembangunan Milenium tersebut ialah keputusan Menkokesra B.10/MENKOKESRA/I/2003 (Forum Koordinasi EFA Indonesia, 2005: 3), RPJPN 2005-2025, RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014 serta APBN (Sardjuani, 2014).

Namun sejak diupayakannya implementasi kedua agenda pendidikan tersebut melalui kebijakan nasional Indonesia, khususnya sejak dicanangkannya program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1994, Indonesia masih belum mampu memenuhi target pencapaian Pendidikan Dasar Universal secara penuh (100%) pada tahun 2015, seperti yang terlihat pada tabel 1. berikut.

Tabel 1. Posisi Indonesia Dalam Pencapaian Target Pendidikan Dasar Universal

Indikator	Tahun	
	1990*(%)	2013/2014**(%)
APM SD (7-12 tahun)	88,70	96,00
Proporsi Murid Mencapai Kelas 5	62,00	96,57
Angka Melek Huruf (15-24 tahun)	96,60	98,88

Sumber: *BPS, Kemdikbud 1990 dan **Kemdikbud 2013/2014, diolah kembali

Sebagai acuan dasar dari target Pendidikan Dasar Universal Tujuan Pembangunan Milenium, *Dakar Framework* turut menyebutkan pentingnya partisipasi CSO (*Civil Society Organizations*) dan NGO (*Non-Governmental Organizations*). *Dakar Framework* menggarisbawahi peran negara sebagai penyedia utama pendidikan dasar, namun di sisi lain menekankan kepada partisipasi CSO dalam formulasi, implementasi serta strategi monitoring untuk pembangunan dalam sektor pendidikan (UNESCO, 2000: 8 dalam Ulleberg, 2009: 9).

Agenda EFA sangat menekankan kepada peran pemerintah dalam memperluas akses dan kualitas pendidikan. Namun, tahun 1990-an ditemukan bahwa negara-negara miskin dan berkembang tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk meraih tujuan EFA dengan tepat waktu. Hal tersebut yang membuat agenda kebijakan EFA untuk membuka peluang yang lebih luas bagi NGO.

Salah satu organisasi yang secara aktif mempromosikan partisipasi CSO dan NGO adalah UNESCO. Untuk mendukung pengimplementasian EFA dan tujuan 2 dalam Tujuan Pembangunan Milenium, UNESCO membentuk dua mekanisme yang menekankan kepada partisipasi NGO dan CSO lainnya, yang diilustrasikan dengan komitmen-komitmen seperti *Collective Consultation of NGOs on EFA* (CCNGO/EFA)

serta *Fast Track Initiative* (FTI) yang kemudian diubah menjadi *Global Partnership for Education* (GPE).

CCNGO/EFA merupakan sebuah proses dimana UNESCO bermaksud mendapatkan pembelajaran melalui dialog bersama CSO, dengan mempromosikan dan memperdalam kolaborasi diantara pemerintah dan CSO, serta mendorong partisipasi CSO dalam upaya-upaya kerjasama dengan EFA (CCNGO/EFA, 2003: 12). Sedangkan FTI dan GPE merupakan sebuah '*global compact*' dalam sektor pendidikan dimana *Capacity Development* (CD) merupakan sebuah aspek penting. *Global compact* sendiri ialah suatu inisiatif internasional untuk mempertemukan pihak-pihak swasta dengan badan-badan PBB dan CSO, guna mendukung sepuluh prinsip dalam hal hak asasi manusia, perburuhan dan lingkungan hidup (UNGC, 2017).

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai NGO dan CSO lainnya yang berlatar belakang kemanusiaan dan pendidikan yang turut berpartisipasi mendampingi pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian Tujuan Pembangunan Milenium dan target Pendidikan Dasar Universal. Salah satunya, ialah *International Humanity Foundation* (IHF).

Melalui publikasi Press Kit-nya (2016: 3), IHF mengklaim telah ikut berkontribusi menyediakan wadah pendidikan bagi sekitar 1.200 anak-anak di dunia, untuk turut berpartisipasi mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium, terutama dalam pencapaian target Pendidikan Dasar Universal melalui center-center pendidikan IHF yang ada, yakni di Nakuru (Kenya), Chiang Rai (Thailand), Medan, Aceh, Bali dan Jakarta (Indonesia).

I.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran *International Humanity Foundation* (IHF) dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal Tujuan Pembangunan Milenium PBB di Indonesia periode 2013-2015?

I.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui peran dan pencapaian IHF sebagai salah satu NGO internasional berlatar belakang bidang kemanusiaan dan pendidikan.
- b. Menganalisis serta memahami peran IHF dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia periode 2013-2015.

I.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, yaitu untuk memberikan informasi dan data dalam studi hubungan internasional terkait peran NGO internasional dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal Tujuan Pembangunan Milenium PBB.
- b. Secara praktis, yakni untuk membantu memberikan pemahaman mengenai peran IHF dalam mendukung target pendidikan dasar Tujuan Pembangunan Milenium PBB di Indonesia periode 2013-2015.

I.5. Tinjauan Pustaka

Literatur yang pertama ialah sebuah hasil penelitian yang berjudul “*An Explorative Research on the Quality of Primary Education in Bali, Indonesia*” yang disusun oleh Teunis Sturing sebagai bagian dari tesis akhir studi Administrasi Publik Eropa, University of Twente.

Penelitian ini berfokus pada anak-anak yatim piatu di Bali dan kesempatan mereka dalam mengakses pendidikan dasar yang berkualitas. Dalam penelitiannya, Sturing melibatkan sebuah NGO bernama *WINS Foundation (Weeskinderen Indonesië Naar School* atau *Orphans of Indonesia to School*).

Dalam hal ini, *WINS Foundation* merupakan salah satu NGO yang berlokasi di Bali dan merupakan yayasan belajar. Saat ini, *WINS Foundation* memiliki lima yayasan

belajar di Bali dan tiga yayasan belajar di Sumatra. Salah satu tujuan *WINS Foundation* juga termasuk untuk membangun lebih banyak lagi yayasan belajar di masa depan.

WINS dalam penelitian Sturing memiliki beberapa bentuk kegiatan belajar-mengajar seperti:

- a. *WINS Project*: bertujuan untuk membuat perbedaan dengan mendukung anak-anak yang berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu untuk mengakses pendidikan yang layak, memberikan anak-anak tersebut motivasi kepada masa depan yang lebih baik dengan menyediakan yayasan belajar bagi anak-anak dari usia 6 hingga 18 tahun sejak 2004.
- b. *WINS Programme*: program ini bertujuan untuk membantu anak-anak di Bali untuk mengakses pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dengan cara mensponsor anak-anak tersebut agar dapat bersekolah.
- c. Beberapa bentuk kegiatan lain yakni dengan menyediakan pembelajaran dalam bidang bahasa Inggris, penggunaan komputer dan internet, pembelajaran budaya, pendidikan seksual, manajemen finansial serta kepedulian terhadap lingkungan.

Sebagaimana yang dituliskan Sturing dalam latar belakang masalah penelitiannya, penelitian Sturing berada pada pokok bahasan mengenai akses pendidikan dasar yang kemudian lebih difokuskan hanya kepada anak-anak yatim piatu di wilayah Bali. Berbeda dengan penelitian Sturing, penelitian ini tidak membatasi kategori anak hanya kepada anak-anak yatim-piatu. Karena IHF sebagai NGO yang dilibatkan, tidak tertutup hanya untuk anak-anak yatim-piatu saja.

Di sisi lain, penelitian Sturing yang melibatkan NGO *WINS Foundation* dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengumpulkan dan mengolah data, karena *WINS Foundation* memiliki bentuk program yang serupa dengan IHF. IHF sendiri menyediakan kelas-kelas kursus gratis Matematika, Bahasa Inggris dan komputer bagi anak-anak usia 6 hingga 18 tahun sebagai program reguler. Program-program lain IHF yaitu seperti Aflatoun (pelajaran mengenai tanggung jawab sosial dan finansial bagi anak-anak) serta kesenian dan kerajinan tangan dalam *special activity class*.

Literatur selanjutnya merupakan sebuah disertasi yang berjudul “*International NGOs in Development Through the Promotion of Children’s Right to Quality Education: the Case of Awutu-Senya District of Ghana*” oleh Baffour Gyimah Kantanka Sarfo sebagai tugas akhir dalam meraih gelar MSc pada studi *Globalization: Global Politics & Culture*, Norwegian University of Science & Technology.

Dalam disertasi ini, *Plan International* merupakan NGO yang dilibatkan oleh Sarfo. Sebagaimana yang dituliskan oleh Sarfo sebagai penemuan-penemuan penelitian dalam disertasinya, kegiatan *Plan International* sebagai salah satu NGO internasional yang beroperasi di Ghana dalam bidang pendidikan berbentuk bantuan seperti sokongan peralatan belajar mengajar dalam proyek yang diberi nama seperti *Preschool Construction with Play Equipments & Furniture* (2002), pembangunan kelas-kelas belajar dalam proyek *Primary School Construction, Furniture* (menyediakan 60 sampai 120 meja belajar) and *Latrines* (2006), *Construction of a Bore Hole* pada tahun 2008, hingga *Rain Water Catchment System* (2002) untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar di Awutu.

Berdasarkan penelitian yang ia lakukan melalui teknik wawancara dengan beberapa sumber dari *Plan International* di Awatu, kegiatan *Plan International* di wilayah tersebut telah tersebar menjadi sekitar 126 kelompok dengan 10.939 anak yang telah di tangani. *Plan International* di wilayah penelitiannya juga telah turut membangun fasilitas toilet dan taman kanak-kanak di Ghana. Selain itu, NGO tersebut juga memperkenalkan dan mempromosikan hak anak-anak untuk mengakses pendidikan dasar berkualitas dengan membentuk asosiasi hak anak yakni, *Rights of the Child Club* (RoC).

Sarfo juga menemukan bahwa NGO tersebut memberikan beasiswa kepada beberapa anak di sekolah dasar yang mereka bantu di Awatu. Adapun bentuk dari beasiswa tersebut yaitu berupa dukungan peralatan tulis dan biaya pendaftaran untuk ujian sertifikasi pendidikan dasar atau *Basic Education Certificate Examination* (BECE). *Plan* di Ghana juga mengorganisir program pelatihan dalam pembangunan

kapasitas seperti *workshop* dan seminar untuk *School Management Committees* (SMC's), serta *Parent Teacher Association* (PTA's).

Penelitian yang Sarfo lakukan mengenai peran NGO dalam mempromosikan pendidikan dasar berkualitas di distrik Awutu-Senya, Ghana, memiliki latar belakang tema yang sama dengan topik penelitian ini, yakni pembangunan strategis tingkat global khususnya dalam konteks Tujuan Pembangunan Milenium. Dalam hal ini, pembangunan strategis tersebut sama-sama dikaitkan dengan akses anak-anak atas pendidikan dasar yang berkualitas atau Pendidikan Dasar Universal.

Adapun perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan dan NGO yang dilibatkan, dimana lokasi penelitian oleh Sarfo dilakukan di distrik Awutu-Senya, Ghana serta melibatkan NGO yang dikenal sebagai *Plan International*. Sedangkan penelitian ini dicakupkan di wilayah cakupan center-center IHF di Indonesia yakni Bali (Kampung Buitan), Aceh (Krueng Woyla), Medan (Tempuling) dan Jakarta (Jakarta Timur).

Terakhir, ialah sebuah tesis yang berjudul "***Non-Governmental Organizations' Educational Contribution to Needy Primary School Children in Voi Division, Kenya***" oleh Grace W. Kiseu dalam meraih gelar Master of Education pada Management, Policy and Curriculum Studies, Kenyatta University.

Terdapat tiga NGO yang terlibat dalam penelitian Kiseu yakni *Plan International*, *Global Education Partnership* dan *World Vision*. Tabel 2 berikut ini merupakan bagian dari hasil penelitian Kiseu yang menunjukkan bahwa kontribusi terbesar NGO di Voi adalah dalam bentuk advokasi sebesar 19%, diikuti penyediaan seragam sebesar 15%. Kontribusi tersebut menghasilkan bertambahnya jumlah anak-anak yang bersekolah dan dalam sisi lain, juga mengurangi tingkat berhenti sekolah pada anak-anak di wilayah Voi.

NGO-NGO tersebut juga mendukung masyarakat Voi dengan menyediakan bahan-bahan pertukangan seperti bebatuan, atau rerumputan untuk membangun dapur beserta atapnya. Dengan ini, orang-orang dewasa di Voi juga turut terbantu untuk menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD),

Kiseu juga menemukan bahwa anak-anak di Voi turut dibantu oleh NGO dengan penyediaan buku-buku, meja-meja belajar, keperluan kesehatan dan kebutuhan primer seperti makanan dan ruang-ruang kelas serta rumah tinggal sederhana yang pada dasarnya sangat berpengaruh dalam mengendalikan tingkat putus sekolah pada anak-anak di wilayah Voi.

Tabel 2. Bentuk Dukungan NGO di Sekitar Wilayah Voi

Kontribusi	Frekuensi	%
Advokasi	10	19
Seragam	8	15
Tas Sekolah	3	6
Meja	7	13
Buku Teks, Pulpen & Penggaris	6	11
<i>School Feeding Program</i>	5	10
Lubang & Tangki Air	4	8
Fasilitas Kesehatan Gratis	5	10
Ruang Kelas/Dapur/Toilet	2	4
PTA/Staff Pengajar	2	4
Total	52	100

Sumber: Grace W. Kiseu, 2012

Dari beberapa penelitian yang penulis dapat temukan berdasarkan tema penelitian yang sama, kebanyakan adalah penelitian terkait peran NGO dalam bidang pendidikan di wilayah yang bukan Indonesia. Adapun penelitian terkait yang area studinya di Indonesia ialah dalam bentuk bantuan sistem administrasi pendidikan seperti

Pasiad (yang sekarang sudah ditutup). Penelitian penulis mengenai peran IHF dalam mendukung target pendidikan dasar universal di Indonesia diharapkan akan memberi perspektif lain dan lebih beragam dalam studi hubungan internasional, khususnya studi pembangunan dan keterkaitannya dengan Pendidikan Dasar Universal dalam kerangka Tujuan Pembangunan Milenium maupun Pendidikan Untuk Semua (EFA) dalam *Dakar Framework*.

I.6. Kerangka Pemikiran

I.6.1. *Non-Governmental Organization* (NGO)

Pada tahun 1945, eksistensi NGO dapat ‘diformalisasi’ bersamaan dengan dibentuknya organisasi internasional PBB lewat Artikel 71 *United Nations Charter*, yang kemudian juga mengabsahkan penggunaan umum istilah “*non-governmental organization*” itu sendiri.

Sebelumnya pada tahun 1910, ketika sekitar 132 NGO internasional memutuskan untuk bekerjasama, PBB mereferensikan NGO kepada istilah “*private organizations*”, dimana pada saat itu kebanyakan NGO menyebut diri mereka sendiri sebagai *international institutes*, *international unions* atau hanya sebagai *international organizations*. Istilah baru diperkenalkan oleh PBB untuk mengklarifikasi hubungan ECOSOC dengan dua tipe organisasi internasional, yakni *specialized agencies* dan NGO. Tidak seperti kebanyakan akronim yang diciptakan PBB, istilah NGO kemudian digunakan secara populer, terutama sejak tahun 1970-an.

Namun seiring dengan perkembangannya, istilah-istilah yang digunakan untuk merujuk kepada NGO semakin beragam sebagaimana beragamnya latar belakang didirikannya NGO-NGO tersebut. Najam (1996: 206; Lewis dan Kanji, 2008: 8-10) kemudian membentuk daftar komprehensif atas 47 akronim yang digunakan di dunia untuk merujuk kepada NGO seperti yang terdapat pada lampiran 5. Menurut Lewis, tidak menutup kemungkinan akan banyaknya istilah-istilah lain diluar daftar tersebut.

a. Konsep NGO

PBB mendefinisikan NGO sebagai organisasi non-profit, kelompok relawan masyarakat yang terorganisir di level lokal, nasional maupun internasional. Didorong kepentingan bersama, NGO melakukan berbagai variasi pelayanan dan fungsi kemanusiaan, membawa kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah, memonitor kebijakan dan mendorong partisipasi politik di level akar rumput (*grassroots*). NGO memiliki fungsi keahlian dan analisis, dapat bekerja sebagai mekanisme peringatan awal dan membantu memantau serta mengimplementasi perjanjian internasional.

Sedangkan, Bank Dunia (1995) dalam *Working with NGOs: A Practical Guide to Operational Collaboration between the World Bank & NGOs*, mendefinisikan NGO sebagai organisasi swasta yang melakukan kegiatan untuk meringankan penderitaan dan mempromosikan kepentingan masyarakat marjinal dan membutuhkan, memberikan pelayanan sosial dasar, melindungi lingkungan atau melakukan pengembangan masyarakat. Dalam penggunaan arti yang lebih luas, istilah NGO dapat diterapkan bagi setiap organisasi non-profit yang independen dari pemerintah.

b. Teori Peran NGO

Menurut Lewis dan Kanji, terdapat banyak tulisan yang mencoba mengkategorikan kompleksitas tipe-tipe peran yang NGO jalankan secara komprehensif (Lewis 2007; Lewis dan Kanji, 2009: 12). Namun, Lewis dan Kanji merangkumnya menjadi lebih sederhana menjadi tiga klasifikasi, yakni:

1) Implementer

Peran NGO sebagai implementer fokus kepada mobilisasi sumber daya dan penyediaan barang serta jasa yang ditujukan bagi orang atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

2) Katalis

Katalis pada umumnya dipahami sebagai pembawa atau pembuat perubahan. Peran katalis NGO dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan

NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi atau berkontribusi untuk mengembangkan pemikiran dan aksi yang dapat mempromosikan perubahan ke arah yang lebih baik.

3) Partner

Peran partner yang dapat dijalankan NGO berarti bekerjasama dan berbagi resiko serta keuntungan dengan aktor dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain. Peran partner NGO terefleksi dari semakin berkembangnya tren kerjasama antara NGO dengan pemerintah, donor dan sektor swasta, melalui berbagai bentuk program. Retorika paling umum yang digunakan dalam peran NGO sebagai partner memberikan tantangan tersendiri bagi NGO untuk membangun hubungan saling menguntungkan yang efektif, responsif namun tidak saling kebergantungan.

Namun bagaimanapun, jarang ditemui pada sebuah NGO yang hanya menjalankan salah satu dari ketiga peran tersebut. Sebaliknya, banyak organisasi internasional non-pemerintah yang menjalankan dan terlibat dalam ketiga tipe peran. Sebagaimana menurut Korten (1990 dalam Lewis dan Kanji, 2009: 13) yang menjelaskan bahwa NGO dan peran-perannya akan bergeser satu sama lain seiring waktu dan berkembangnya peluang yang ada.

I.6.2. Capacity Development (CD)

Capacity development menjadi penting untuk dilibatkan dalam kerangka pemikiran penelitian ini karena *capacity development* sendiri merupakan ide dasar dari munculnya inisiatif pembangunan global, yang salah satu diantaranya adalah Tujuan Pembangunan Milenium. Istilah *capacity development* muncul sejak tahun 1980-an dan menjadi tujuan utama dalam kerjasama sejak tahun 1990-an. Termasuk di dalam konsep CD yakni *institution building*, *institutional development*, *human resource development*, *development management/administration* dan *institutional strengthening* (UNDP, 1996; Lusthaus, Adrien, Parstinger, 1999: 1).

a. Konsep *Capacity Development*

Menurut Cohen (1993 dalam Lusthaus, Adrien dan Perstinger, 1999: 3), *capacity development* adalah "...sebuah sistem, upaya ataupun proses yang mana termasuk diantara tujuan atau objektifnya ialah untuk memperkuat kapabilitas kepala eksekutif, kepala administratif, kepala departemen dan insitusi serta manajer program dalam tujuan umum pemerintah untuk merencanakan, mengimplementasi, mengolah atau megevaluasi kebijakan, strategi serta program yang dibuat untuk memberikan dampak pada kondisi sosial masyarakat."

Sedangkan menurut Morgan (1996) dan UNDP (1999) dalam makalah yang sama, CD adalah strategi inklusif yang melibatkan level nasional, regional, organisasi dan institusi lokal, sebagaimana layaknya masyarakat diatur oleh negara, oleh organisasi pemerintah maupun swasta dalam peran-peran mereka sebagai masyarakat sipil.

I.6.3. Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*)

Tujuan Pembangunan Milenium merupakan proyek inisiasi PBB yang lahir seiring dengan diadopsinya *Millenium Declaration* atau Deklarasi Milenium oleh 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB pada bulan September tahun 2000 di New York.

Dalam Tujuan Pembangunan Milenium sendiri terdapat 8 tujuan dengan 18 target yang beragam serta lebih dari 40 indikator terkait, yang ditetapkan untuk dicapai dalam jangka waktu 25 tahun, terhitung sejak tahun 1990. Adapun delapan tujuan yang terdapat dalam kerangka Tujuan Pembangunan Milenium ialah:

- a. Memangkas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem
- b. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
- c. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- d. Menurunkan Angka Kematian Anak
- e. Meningkatkan Kesehatan Ibu
- f. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria, Serta Penyakit Lainnya
- g. Memastikan Kelestarian Lingkungan
- h. Mempromosikan Kerjasama Global Untuk Pembangunan

I.6.4. Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*) dan Pendidikan Dasar Universal (*Universal Primary Education*)

a. Pendidikan Untuk Semua

Sebagai salah satu negara anggota UNESCO, Indonesia turut mengimplementasi *The Dakar Framework on Action* untuk program Pendidikan Untuk Semua atau *Education for All* (EFA) secara strategis, sejak dilaksanakannya *World Education Forum* di Dakar, Senegal oleh UNESCO pada April tahun 2000. Forum tersebut dihadiri oleh 164 negara bersama dengan representatif dari berbagai organisasi regional maupun internasional, agensi donor, CSO serta NGO. Adapun enam tujuan EFA yang diadopsi oleh negara-negara tersebut menurut laporan Forum Koordinasi EFA Indonesia (2015: 9):

- 1) Memperluas serta meningkatkan kesempatan dalam pendidikan usia dini secara komprehensif
- 2) Memastikan pada tahun 2015, semua anak-anak, terutama anak-anak perempuan, anak-anak dalam situasi yang sulit serta anak-anak yang berasal dari etnis minoritas, dapat memiliki akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas
- 3) Memastikan terpenuhinya kebutuhan pendidikan usia remaja dan dewasa melalui akses yang merata atas program-program belajar serta keterampilan hidup yang baik
- 4) Mencapai setidaknya 50% dalam angka melek huruf usia dewasa pada tahun 2015, khususnya perempuan, serta akses yang merata atas pendidikan dasar dan keberlanjutan untuk semua orang usia dewasa

- 5) Memperkecil angka disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, mencapai kesetaraan gender dalam bidang pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus untuk memastikan akses penuh serta merata bagi perempuan dalam bidang pendidikan yang berkualitas
- 6) Meningkatkan semua aspek dalam kualitas pendidikan agar setiap orang dapat mencapai hasil pembelajaran yang baik, khususnya dalam bidang literasi, numerasi dan keterampilan hidup.

b. Pendidikan Dasar Universal

Universal Primary Education atau yang juga sering disebut sebagai Pendidikan Dasar Untuk Semua, merupakan istilah yang sama yang digunakan untuk merujuk kepada tujuan 2 dari EFA pada April 2000 dan tujuan 2 dalam rangkaian Tujuan Pembangunan Milenium pada September 2000.

Pada dasarnya, Tujuan Pembangunan Milenium mengadopsi tujuan tersebut dan menjadikannya sebagai target ke 3 dari tujuan ke 2 dalam 8 rangkaian Tujuan Pembangunan Milenium untuk dicapai pada tahun 2015. Perbedaannya adalah, tujuan 2 EFA menekankan kepada akses pendidikan dasar bagi anak-anak perempuan, sedangkan target ke 3 dari tujuan 2 dalam Tujuan Pembangunan Milenium meletakkan hak anak-anak perempuan dan anak laki-laki pada posisi yang sama.

Seperti yang dikutip dari laporan Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia berikut, bahwa target ke 3 dari tujuan 2 Tujuan Pembangunan Milenium ialah: *“ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling”*. Atau untuk memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak-anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka (2004: 36).

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian target Pendidikan Dasar Universal EFA dan Tujuan Pembangunan Milenium digunakan tiga indikator

resmi berdasarkan rumusan yang dibentuk oleh UNESCO (Bappenas & BPS, 2011), yaitu:

- 1) Angka Partisipasi Murni (APM) di Sekolah Dasar (*Nett Enrolment Ratio in Primary Education*)

Merupakan perbandingan antara murid SD/setara berusia 7-12 tahun dengan penduduk usia 7-12 tahun yang dinyatakan dalam persentase.

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Banyak murid SD usia 7-12 tahun}}{\text{Banyak penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

- 2) Proporsi murid yang berhasil mencapai kelas 5 (*Survival Rate to 5th Grade of Primary Education*)

Adalah perbandingan antara banyaknya murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas 5 pada tahun tertentu terhadap jumlah murid kelas 1 pada lima tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam persentase.

$$\text{PMT-SD} = \frac{\text{Banyak murid 5 SD}}{\text{Banyak murid kelas 1, lima tahun sebelum}} \times 100\%$$

- 3) Angka melek huruf usia 15-24 tahun (*Youth Literacy Rate*)

Merupakan perbandingan jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, dengan jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang dinyatakan dalam persentase. AMH merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar yang juga kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kesejahteraan sosial dan ekonomi (Bappenas & BPS, 2011: 15).

$$\text{AMH 15-24} = \frac{\text{Banyak penduduk usia 15-24 melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun}} \times 100\%$$

1.6.5. Pendidikan Non-Formal

Menurut M.K Smith (2001), dengan mengutip Fordham (1993), ide mengenai pendidikan non-formal muncul bersamaan dengan munculnya analisis mengenai semakin berkembangnya ‘krisis pendidikan dunia’ (istilah yang dirujuk oleh Coombs, 1968) dalam sebuah konferensi internasional di Williamsburg, Amerika Serikat pada tahun 1967. Pada saat yang bersamaan, terbentuk motivasi dalam UNESCO untuk menuju kepada konsep *lifelong education* dan terbentuknya gagasan mengenai ‘*the learning society*’. Pada tahun 1972 kemudian, UNESCO menjadikan *lifelong learning* sebagai ‘*master concept*’, gagasan utama yang mendasari sistem pendidikan (1972: 182; Smith, 2001).

a. Konsep Pendidikan Non-Formal

Konsep klasik atas pendidikan non-formal dikembangkan oleh Coombs dan Ahmed pada tahun 1973 (Kedrayate, 1997), yakni sebagai kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistematis yang dilakukan di luar kerangka sistem formal, yang dibentuk untuk menyediakan jenis pembelajaran tertentu bagi sub-kelompok dalam masyarakat dari usia anak-anak hingga usia dewasa.

Namun menurut Rose (2009: 221), definisi Coombs dan Ahmed hanya berfokus kepada bagaimana pendidikan non-formal disediakan bukan oleh siapa pendidikan non-formal tersebut disediakan. Sedangkan, seiring waktu, istilah pendidikan non-formal menjadi sangat sering diasosiasikan dengan pendidikan yang disediakan NGO (*NGO provision*) di saat pendidikan formal merujuk kepada pendidikan yang disediakan pemerintah (*government provision*).

b. Teori Tipe-Tipe Pendidikan Non-Formal

Hoppers dan UNESCO (2006: 23-31) mengklasifikasikan tipe-tipe pendidikan non-formal menjadi sebagai berikut:

1) *Para-Formal Education*

Carr-Hill *et al.* (1991; Hoppers 2006) mencontohkan kegiatan yang termasuk ke dalam *para-formal education* yakni seperti les privat, program pendidikan

jarak jauh, atau program pelatihan kejuruan dan teknis. Selain itu berbeda dengan tipe pendidikan non-formal lainnya, *para-formal education* berkaitan erat dengan kebijakan pendidikan yang berbentuk formal, salah satu contoh ialah sertifikasi pendidikan. Verhine (1993; Hoppers 2006) bahkan mendefinisikannya sebagai ‘pendidikan formal jalur alternatif’.

2) *Popular Education*

Menurut La Belle (1986; Hoppers 2006), *popular education* bermaksud untuk menggabungkan kesadaran kritis akan pentingnya literasi dan keterampilan dasar lainnya dengan aksi sosial. Tipe pendidikan non-formal ini seringkali menjadi label atas beragam kegiatan dalam bidang pendidikan literasi dan keterampilan dasar lain yang dilakukan oleh gerakan dan otoritas sosial dalam masyarakat.

3) *Personal Development*

Tipe pendidikan non-formal ini didefinisikan sebagai program pendidikan yang mencakup berbagai kegiatan waktu luang yang diorganisir oleh institusi-institusi yang berorientasi pasar/profit. Menurut Field (2000, Hoppers 2006), tipe ini merupakan bentuk baru pendidikan usia dewasa yang bersifat sangat individualistik. Termasuk beberapa contohnya yakni seperti pusat kebugaran, pusat olahraga, pusat peninggalan sejarah atau program *self-therapy*.

4) *Professional & Vocational Training*

Berbeda dengan *para-formal education*, tipe pendidikan non-formal ini mencakup semua bentuk pelatihan diluar bentuk formal atau non-formal yang bertujuan kepada ijazah setara tingkat nasional. Tipe ini termasuk berbagai program komersil yang disediakan oleh sekolah dan perguruan tinggi.

5) *Literacy With Skills Development*

Tipe pendidikan non-formal berikut menggabungkan literasi dengan pengembangan keterampilan yang disediakan oleh organisasi non-pemerintah maupun otoritas tingkat lokal lainnya. Merupakan tipe yang seringkali dikaitkan dengan pendidikan bagi mereka yang termasuk usia

muda namun dikategorikan terlalu tua untuk dapat mengakses pendidikan di sekolah.

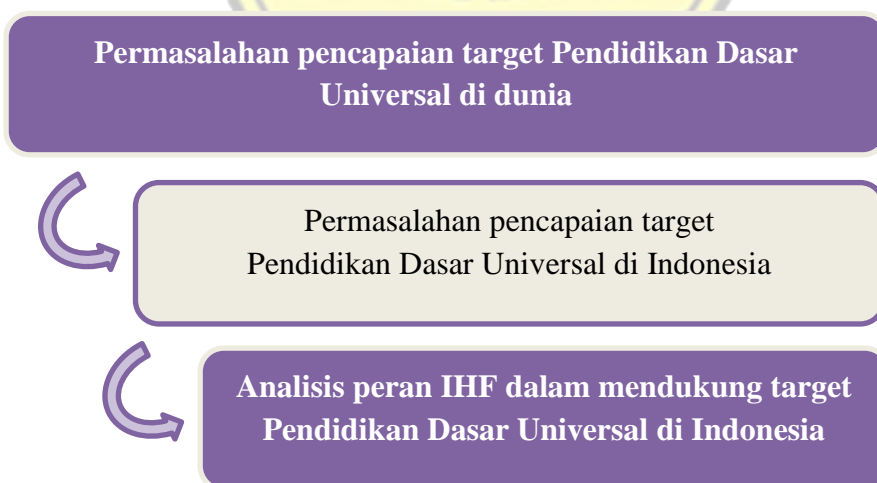
6) *Supplementary Non-Formal Education Programmes*

Merupakan tipe pendidikan non-formal yang menyediakan bentuk pendidikan suplementer bagi anak-anak yang masih dalam posisi dapat mengakses pendidikan di sekolah. Dengan menggabungkan beberapa komponen dalam pendekatan formal dan non-formal, tipe pendidikan ini bersifat *cost-effective* dalam menyediakan manfaat baik dari pendidikan formal dan non-formal dalam satu bentuk program pendidikan. Beberapa bentuk programnya ialah seperti konseling, dukungan nutrisi (penyediaan makanan bergizi), *childcare*, proteksi melalui penyediaan tempat tinggal (*shelter*) dan dukungan medis.

7) *Early Childhood Care and Education*

Merupakan bentuk kegiatan dan program pra-sekolah yang menggunakan pendekatan *home-based* atau *community-based* (disediakan oleh bagian dari masyarakat sipil itu sendiri).

I.7. Alur Pemikiran



I.8. Asumsi

- a. IHF didirikan sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang menjalankan peran implementer (*service delivery*) dan peran partner, secara umum, baik dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan.
- b. IHF merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang turut berperan dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal di Indonesia, dengan menyediakan pendidikan dalam bentuk non-formal bagi anak-anak usia setara kelas 1 SD hingga 3 SMA.

I.9. Metode Penelitian

I.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berfokus kepada proses yang interaktif dengan analisis yang menggunakan tema tertentu (Crewsell (1994), Denzin & Lincoln (2003a), Guba & Lincoln (1994), Marvasati (2004), Mostyn (1985), Tashakkori & Teddlie; Neuman, 2014: 17). Dalam hal ini, tema yang digunakan adalah target Pendidikan Dasar Universal Tujuan Pembangunan Milenium PBB.

I.9.2. Jenis Penelitian

Berdasarkan penggunaannya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian terapan atau *applied research* (Neuman, 2014: 27), dimana jenis penelitian memiliki fokus tertentu dengan skala/cakupan wilayah penelitian yang kecil serta dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Sebagaimana merupakan karakteristik penelitian terapan, penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu pendek dan hanya meliputi cakupan wilayah IHF di Indonesia. Sedangkan, dalam sub-tipe penelitian terapan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluatif atau *evaluation research*, karena penelitian ini mencoba untuk menentukan seberapa efektif sebuah program telah berjalan dalam meraih objektifnya. Dalam hal ini, *summative evaluation* (2014: 29) merupakan sub-kategori dari jenis *evaluation research* yang digunakan, karena

penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi hasil akhir dari peran IHF dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal untuk dicapai pada tahun 2015 di Indonesia, bukan untuk memonitor peran IHF tersebut secara berkelanjutan (*formative evaluation*).

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Dimana tujuan utama dari tipe penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran menggunakan kata atau angka dalam mempresentasikan suatu hal, yang hasil penelitiannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana (Neuman, 2014: 38). Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran IHF dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2015.

I.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, yakni data-data kualitatif. Dalam pengumpulan data-data kualitatif seperti diantaranya dokumen, foto, wawancara singkat (*open-ended interview*), dan sebagainya, disimplifikasikan teknik pengumpulan data menjadi dua kategori (Neuman, 2014: 51) yakni riset lapangan atau *field research* dan riset komparatif-historis atau *historical-comparative research*.

Dalam konteks penelitian ini, kedua teknik pengumpulan data digunakan secara partial. *Field research* bersifat etnografis dan melibatkan peneliti secara langsung. Teknik ini dapat membantu dalam mengumpulkan data-data hasil observasi (seperti catatan lapangan, foto) dan wawancara informal. Sedangkan *historical-comparative research* digunakan dalam mengumpulkan data-data pada masa dan situasi tertentu yang diantaranya seperti dalam bentuk data statistik, dokumen (buku, koran, jurnal, fotografi, dll), observasi dan wawancara.

Dalam menggunakan kedua teknik penelitian ini, adapun data-data yang dimaksud kemudian dikategorikan menjadi:

- a. Data primer, dikumpulkan melalui teknik wawancara informal (*field research*) dengan salah satu *Co-Director* IHF di wilayah Indonesia, yakni Maria Vernanda Vargas.
- b. Data sekunder, yakni melalui dokumen-dokumen yang dipublikasikan melalui internet (*historical-comparative research*), antara lain seperti *IHF Annual Report 2013*, *IHF Annual Report 2014*, *IHF Annual Report 2015*, dan *IHF Press Kit 2016*.

I.9.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis data berarti mengorganisir, menghubungkan dan menguji secara sistematis untuk mencari pola dan hubungan diantara setiap detail, dimana analisis dilakukan dengan mengorganisir data menjadi kategori-kategori yang berdasarkan tema atau konsep yang sama (Neuman, 2014: 477).

Berdasarkan penjelasan Neuman (2014: 487) mengenai teori teknik analisis data kualitatif, dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, digunakan teknik analisis data metode ilustratif, atau *illustrative method*. Adapun yang dimaksud dengan metode ilustratif menurut Neuman, yakni analisis data yang dilakukan dengan mengaplikasikan teori kepada situasi sosial/kasus tertentu dengan mengorganisir data sesuai dengan teori tersebut. Oleh karenanya, terdapat dua teori yang digunakan dalam mengorganisir data dan hasil/penemuan penelitian ini, yakni:

- a. Teori peran oleh Lewis dan Kanji (2009), khususnya teori peran implementer dan teori peran partner.
- b. Teori tipe-tipe pendidikan non-formal oleh Hoppers dan UNESCO (2006), khususnya tipe pendidikan non-formal *popular education* dan tipe pendidikan non-formal *supplementary Non-Formal Education (NFE) programmes*.

Selanjutnya, dari ketiga variasi teknik dalam metode ilustratif oleh Neuman (2014: 490), penelitian ini secara khusus menggunakan variasi teknik *case clarification*, yang digunakan untuk mengklarifikasi teori dan asumsi, dimana asumsi tersebut pada

dasarnya dibangun oleh teori bersangkutan. Adapun penelitian ini bermaksud untuk mengklarifikasi dua asumsi yang dibangun oleh dua teori (Lewis dan Kanji (2009) serta Hoppers dan UNESCO (2006)), yakni:

- a. Mengenai peran implementer dan partner yang dijalankan oleh IHF, secara umum, sebagai NGO internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan;
- b. Serta secara khusus yakni asumsi mengenai peran IHF dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal dengan menyediakan beberapa bentuk pendidikan non-formal di Indonesia.

I.10. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II PENCAPAIAN IHF SECARA UMUM SEBAGAI NGO INTERNASIONAL BERLATAR BELAKANG BIDANG KEMANUSIAAN DAN PENDIDIKAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai dinamika perkembangan dan profil umum IHF diikuti dengan pencapaian IHF secara umum sebagai NGO internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan.

BAB III PERAN IHF DALAM Mendukung Target Pendidikan Dasar Universal Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia Periode 2013-2015

Membahas jawaban penelitian yakni mengenai peran IHF dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia periode 2013-2015.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran

